E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://epaper.dpr.go.id

Judul : Anggota DPR Minta RI Perkuat Diplomasi Mobilisasi Sumber Daya demi Turunkan Emisi
Tanggal : Rabu, 20 November 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari meminta Pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi dan negosiasi ke dunia internasional terkait pembiayaan berkelanjutan dalam rangka mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Menurutnya, komitmen dan ambisi Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebagaimana tercantum dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contributions* (NDC) membutuhkan biaya lebih dari Rp 4.000 triliun. Namun, ia menilai hal ini tidak mungkin dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Anggaran untuk pemenuhan NDC sebesar Rp 4.000 triliun itu tidak akan mampu dibiayai sendiri oleh Indonesia," ujar Ratna seperti dikutip, Rabu (20/11/2024). "Pemerintah harus berupaya lebih keras untuk membangun diplomasi agar dapat memobilisasi sumber daya dari negara-negara maju dalam COP29 di Baku ini," kata Ratna lagi. Anggota DPR dari daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro itu juga mengatakan, Indonesia memiliki posisi sangat penting bagi kesuksesan agenda global dalam pengendalian perubahan. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan alam terbesar di dunia. "Sebagai satu dari tiga negara pemilik hutan alam terbesar dan juga negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, komitmen Indonesia harus didukung komunitas internasional, khususnya negara-negara maju", ucap Ratna. Dia mencontohkan, pemerintah harus mampu menarik bantuan internasional dalam bentuk hibah serta menarik investasi dari perdagangan karbon internasional. Ratna pun mendorong Indonesia membuka peluang soal perdagangan karbon internasional melalui skema pasar karbon sukarela. "Dunia internasional dan investor harus berhasil diyakinkan bahwa Indonesia terbuka dan mendukung skema tersebut," ucap Ratna. Dia meyakini, jika perdagangan karbon internasional melalui skema pasar karbon sukarela pada sektor kehutanan dan energi baru terbarukan bisa berjalan, akan mewujudkan target pembangunan hijau dan komitmen menuju Net Zero Emission 2060. "Investasi hijau untuk konservasi hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati, serta percepatan bauran energi baru terbarukan akan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan," ujarnya. Adapun Ratna menjadi salah satu pembicara pada sesi diskusi Conference of the Parties (COP) bertajuk "Climate Breakthroughs for Finance, Forest, Energy and Waste" di Paviliun Indonesia, Baku, Azerbaijan, Selasa (19/11/2024). KTT Perubahan Iklim PBB atau *Conferrence of the Parties* ke-29 (COP29) digelar di Baku, Azerbaijan mulai Senin (11/11/2024) hingga Jumat (22/11/2024). COP merupakan pertemuan tahunan antara 197 negara yang telah menyetujui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim pada 1992. Adapun COP ke-29 saat ini digelar di Baku, Azerbaijan sejak 11 November sampai 22 November 2024. Tujuan digelarnya COP29 utamanya untuk membahas masalah new collective quantified goal, yaitu target pendanaan iklim tahunan baru.